

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu individu, masyarakat atau komunitas nasional tempat individu tersebut berada, serta seluruh konten realitas—baik material maupun spiritual—yang membentuk karakter, nasib, dan peradaban manusia serta masyarakat. Pendidikan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses pengajaran, melainkan sebagai suatu proses komprehensif yang meliputi penyebaran pengetahuan, transformasi nilai, serta pembentukan kepribadian individu secara utuh dalam berbagai aspek kehidupan (Nurkholis, 2023). Dengan demikian, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan arah pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa

diskriminasi.” Ketentuan ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bentuk implementasi kebijakan di tingkat daerah, Pemerintah Kota Tangerang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Pasal 3 peraturan daerah tersebut ditegaskan bahwa salah satu tujuan utama penyelenggaraan pendidikan adalah untuk menjamin akses pelayanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, Pemerintah Kota Tangerang kemudian menggagas dan melaksanakan Program Tangerang Cerdas sebagai instrumen kebijakan publik di bidang pendidikan. Program ini secara teknis operasional diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Personil Siswa Tangerang Cerdas. Peraturan wali kota tersebut berfungsi sebagai petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program agar penyaluran bantuan pendidikan dapat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Meskipun secara umum tingkat pendidikan di Kota Tangerang menunjukkan tren yang semakin membaik, tantangan terkait aksesibilitas dan beban biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu masih menjadi persoalan krusial. Oleh karena itu, keberadaan Program Tangerang Cerdas menjadi fokus penting untuk terus dievaluasi guna memastikan efektivitasnya dalam menjamin keadilan dan pemerataan kesempatan pendidikan.

Berdasarkan dari laporan Dinas Pendidikan Kota Tangerang (2022), sejak diterbitkannya Program Tangerang Cerdas sudah menjangkau lebih dari 420 sekolah yang dimulai dari jenjang SD sampai dengan SMP negeri ataupun swasta. Cakupan ini mengikutsertakan lebih dari 5.800 siswa yang menjadi penerima beasiswa ataupun bantuan perlengkapan sekolah. Perihal ini menjadi suatu bukti yang nyata bahwa pendidikan kebijakan publik daerah bisa memberi kontribusi dengan cara yang signifikan untuk melakukan perluasan pada akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu (Aida, 2025).

Teori kebijakan publik menyatakan bahwa kebijakan daerah yang efektif bersifat responsif terhadap permasalahan lokal dan dapat beradaptasi terhadap kebijakan nasional yang terus berubah (Dye, 2013). Fokus penelitian ini adalah pada keberagaman karakteristik demografi dan keberagaman kondisi perekonomian Kota Tangerang. Penyebab utama permasalahan pendidikan di Kota Tangerang adalah ketimpangan ekonomi yang menyebabkan tingginya proporsi anak putus sekolah. Untuk itu, Program Tangerang Cerdas dikembangkan sebagai salah satu jenis kebijakan publik daerah yang menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini misalnya terjadi pada perubahan kebijakan pendidikan yang diatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Keuangan terkait alokasi anggaran pendidikan. Untuk mengurangi angka putus sekolah dan memastikan bahwa semua anak mempunyai hak untuk belajar, program ini memberikan hibah, perlengkapan sekolah dan subsidi biaya pendidikan. Program ini bertujuan tidak hanya memberikan dukungan materi, namun juga menciptakan

lingkungan pendidikan inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam mendukung proses belajar mengajar. Namun, dari sudut pandang kebijakan terhadap “kesenjangan penelitian” dalam hal penilaian komprehensif terhadap efektivitas program ini, khususnya terkait dengan pemantauan dan distribusi bantuan kepada pihak yang benar-benar mengklaimnya.

Pada aspek pendanaan, Pemerintah Kota Tangerang melakukan pengalokasian anggaran yang secara terus-menerus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Pada tahun 2021 anggaran program Tangerang cerdas tercatat sebesar Rp. 52 Miliar, tahun 2022 meningkat menjadi Rp 58,7 miliar dan pada 2023 kembali naik hingga Rp64,5 miliar (Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2022; Pemerintah Kota Tangerang, 2023). Kenaikan alokasi ini memperlihatkan bahwa adanya komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan secara berkelanjutan program.

Program Tangerang Cerdas mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan yang memadai dan merupakan evaluasi kebijakan publik daerah. Namun, setiap perubahan aturan pemerintah pusat, misalnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan, berdampak pada penerapan pedoman besaran dana pendidikan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Langkah-langkah di tingkat daerah seperti Tangerang juga perlu diadaptasi (Dye, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk menyesuaikan pelaksanaan program ketika peraturan utama berubah.

Evaluasi program ini juga harus mempertimbangkan teori evaluasi kebijakan publik, yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat

bergantung pada kualitas koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas mekanisme monitoring (Edwards III, 1980). Dalam konteks Program Tangerang Cerdas, meskipun bantuan berupa beasiswa dan subsidi pendidikan telah meringankan beban ekonomi keluarga, proses distribusi bantuan sering kali menghadapi kendala terkait keakuratan pendataan dan monitoring perkembangan pendidikan siswa penerima bantuan (Julius et al., 2019). Menurut data dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, program ini telah memberikan bantuan kepada ribuan siswa, namun evaluasi yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Penerima dan Anggaran Tangerang Cerdas 2025

Jenjang Pendidikan	Periode (Semester)	Jumlah Penerima (Siswa)	Nominal Bantuan /Bulan	Total Anggaran (1 Semester)
SD / MI	Semester I	7.000	Rp80.000	Rp3.360.000.000
	Semester II	7.200	Rp80.000	Rp3.456.000.000
Total SD (Tahunan)		14.200		Rp6.816.000.000
SMP / MTs	Semester I	4.897	Rp100.000	Rp2.938.200.000
	Semester II	4.873	Rp100.000	Rp2.923.800.000
Total SMP (Tahunan)		9.770		Rp5.862.000.000

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan observasi lapangan yang di lakukan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang pada 30 Januari 2026.

Berdasarkan Tabel 1.1, Program Tangerang Cerdas Tahun 2025 menunjukkan distribusi bantuan pendidikan yang konsisten bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs di Kota Tangerang. Untuk jenjang SD/MI, program ini menjangkau 7.000 siswa pada Semester I dan meningkat menjadi 7.200 siswa pada Semester II, dengan nominal bantuan sebesar Rp80.000 per siswa per bulan, sehingga total anggaran tahunan mencapai Rp6,816 miliar. Sementara itu, untuk jenjang SMP/MTs, jumlah penerima program relatif stabil, yakni 4.897 siswa pada

Semester I dan 4.873 siswa pada Semester II, dengan bantuan Rp100.000 per siswa per bulan, sehingga total anggaran tahunan sebesar Rp5,862 miliar. Data ini mencerminkan upaya pemerintah Kota Tangerang dalam menyalurkan bantuan pendidikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh siswa di wilayahnya.

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Penerima Program Tangerang Cerdas 2025

Jenjang Pendidikan	Realisasi Semester I (Siswa)	Realisasi Semester II (Siswa)	Selisih (Kenaikan/Penurunan)	Persentase Perubahan	Keterangan Tren
SD / MI / SKh	7.000	7.200	+ 200	+ 2,8%	Tren Meningkat
SMP / MTs / SKh	4.897	4.873	- 24	- 0,5%	Tren Stabil
TOTAL	11.897	12.073	+ 176	+ 1,5%	Positif

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan observasi lapangan yang di lakukan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang pada 30 Januari 2026.

Berdasarkan tabel 1.2, terlihat bahwa jumlah penerima di jenjang SD/MI/SKh mengalami peningkatan dari 7.000 siswa pada Semester I menjadi 7.200 siswa pada Semester II, meningkat sebanyak 200 siswa atau 2,8%, sehingga menunjukkan tren positif. Sebaliknya, pada jenjang SMP/MTs/SKh terjadi penurunan kecil dari 4.897 siswa menjadi 4.873 siswa, berkurang 24 siswa atau 0,5%, yang mengindikasikan tren relatif stabil. Secara keseluruhan, total realisasi penerima program meningkat dari 11.897 siswa pada Semester I menjadi 12.073 siswa pada Semester II, mengalami kenaikan 176 siswa atau 1,5%, menandakan pertumbuhan positif dan keberlanjutan program yang konsisten dalam menjangkau siswa di Kota Tangerang.

Dalam kebijakan publik yang adaptif, evaluasi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pertanyaan yang muncul antara lain,

apakah siswa penerima bantuan dari Program Tangerang Cerdas mampu menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dengan baik, serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Kota Tangerang secara keseluruhan? Selain itu, apakah ada perbedaan signifikan antara hasil akademik siswa penerima bantuan dana dan yang tidak menerima bantuan? Kajian seperti ini penting untuk menilai keberlanjutan dan dampak nyata dari program ini (Howlett & Ramesh, 2020). Salah satu indikator keberhasilan Program Tangerang Cerdas adalah penurunan angka putus sekolah di Kota Tangerang. Namun, tantangan tetap ada dalam sosialisasi dan penyebaran informasi program ini. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk mesosialisasikan melalui berbagai media, masih banyak masyarakat yang kurang memahami prosedur dan manfaat dari program ini (Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2022; Pemerintah Kota Tangerang, 2023). Teori komunikasi kebijakan publik menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program juga ditentukan oleh efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah (Dye, 2013). Dalam hal ini, peran media lokal dan tokoh masyarakat sangat penting untuk memastikan informasi mengenai program ini tersebar merata di seluruh wilayah Kota Tangerang (Program Tangerang Cerdas, 2019). Akibat pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan pendidikan, pemerintah daerah harus mengkaji ulang alokasi anggaran untuk memastikan program ini tetap berfungsi secara optimal. Hal ini sesuai dengan teori siklus evaluasi kebijakan yang menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala agar efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Howlett & Ramesh, 2020). Penilaian berkelanjutan ini akan memandu pemerintah dalam mengembangkan

kebijakan pendidikan di masa depan dan memperkuat sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan terdapatnya data capaian yang terukur, transparansi penggunaan anggaran serta efektivitas distribusi bantuan bisa dipantau secara lebih baik. Evaluasi berbasis data ini penting dalam menghindari potensi salah sasaran dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah (Aida, 2025). Selain itu, monitoring yang dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dengan melibatkan sekolah dan masyarakat bisa menjadi sarana guna memastikan bahwa program benar-benar berfungsi dan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi Program Tangerang Cerdas dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Tangerang?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Tangerang Cerdas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Personil Siswa Tangerang Cerdas, tujuan utama penyelenggaraan Program Tangerang Cerdas adalah menjamin akses pelayanan pendidikan yang adil, merata, dan bermutu bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta menurunkan angka putus sekolah di Kota Tangerang.

Sejalan dengan tujuan kebijakan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi efektivitas Program Tangerang Cerdas dalam meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu di Kota Tangerang sebagaimana diamanatkan dalam regulasi daerah yang berlaku.
2. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan Program Tangerang Cerdas dengan tujuan kebijakan pendidikan daerah, khususnya dalam menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
3. Menilai manfaat dan dampak Program Tangerang Cerdas, terutama dalam kaitannya dengan penurunan angka putus sekolah serta keberlanjutan pendidikan peserta didik penerima bantuan.
4. Mengidentifikasi tantangan dan kendala pelaksanaan Program Tangerang Cerdas sebagai dasar perbaikan kebijakan pendidikan daerah di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur kebijakan publik, khususnya dalam bidang pendidikan di tingkat daerah.

Kajian ini akan menambah wawasan mengenai evaluasi kebijakan pendidikan lokal, serta adaptasi kebijakan terhadap regulasi nasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dan pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan program pendidikan untuk masyarakat kurang mampu. Hasil evaluasi program dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan dan strategi evaluasi, khususnya terkait distribusi bantuan dan monitoring efektivitas program.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan upaya peneliti untuk melakukan perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu memposisikan penelitian dan mengidentifikasi kebaruannya. Penulis telah menyiapkan perbandingan lima penelitian penting, yang akan disajikan dalam bentuk referensi untuk mengklarifikasi perbedaan fokus, pendekatan, dan setting penelitian.

“Evaluasi Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa sebagai Sistem Perlindungan Sosial di Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto” oleh Sri Wibawani, Felixtha Hernanda, Rehan Ganadewa Kusuma, dan Fanny Andrianto Erawan (2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) sebagai sistem perlindungan sosial di desa. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan proses evaluasi yang terdefinisi dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi Dunn, yang berfokus pada penilaian penyaluran bantuan tunai langsung (BLT) sebagai jaring pengaman sosial. Hasil penelitian ini menentukan evaluasi

program penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa sebagai jaring pengaman sosial di Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Evaluasi program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa menunjukkan bahwa masyarakat telah melemah. Oleh karena itu, kerangka kerja pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut adalah alokasi dana oleh pemerintah daerah, yang kemudian dialihkan ke dana daerah.

“Analisis Perencanaan dan Evaluasi Anggaran dalam Pembangunan Kinerja Pemerintah Daerah Aceh Singgal” oleh Teuku Rully Hendrawan Marlon Sibombing Maksum Syahri Lubih (2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perencanaan dan evaluasi keuangan dalam pembangunan Pemerintah Daerah Aceh Singgal, serta mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi dalam perencanaan dan evaluasi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang berfokus pada analisis perencanaan dan evaluasi keuangan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan evaluasi keuangan Pemerintah Daerah Tungal Aceh tidak meningkatkan kinerja sistem keuangan, khususnya upaya pengumpulan data baru untuk perencanaan keuangan, evaluasi kinerja, dan penghapusan kendala keuangan.

“Studi tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Keuangan dan Manajemen Aset (BPKAD) Kota Medan” Muhammad Irfan Nasushan Narwani, M.Si (2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana SIPD diimplementasikan di Kota Medan. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menggambarkan data berdasarkan temuan peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada implementasi dan evaluasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPKAD Kota Medan telah mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk melaksanakan kebijakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam program Pemerintah Kota Medan.

“Mempromosikan Kewirausahaan Masyarakat di Komunitas ECO Business Indonesia, Desa Kedawong, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan” oleh Khairan Naim (2017). Tujuan makalah penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat (PETAKA) melalui Program Pembangunan Berkelanjutan (PETAKA) di Komunitas Eco Business Indonesia (EBI) di Desa Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Makalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Makalah penelitian ini menggunakan teori kewirausahaan masyarakat dengan fokus pada promosi kewirausahaan masyarakat. Temuan penelitian ini berkaitan dengan implementasi program kewirausahaan berbasis masyarakat melalui proyek PETAKA EBI, yang meliputi (1) pelatihan kewirausahaan, penyediaan keterampilan hidup untuk membuat kerajinan dari limbah melalui kolaborasi, yang memungkinkan peserta PETAKA untuk mengelola persaingan mereka sendiri. (3) sumber daya berupa penyediaan bahan untuk membuat kerajinan dan alat jahit.

“Studi tentang Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Tangerang Live di Kota Tangerang” oleh Wihio Hidayat (2021). Studi ini bertujuan untuk meneliti implementasi, pendorong, dan hambatan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Tangerang Live. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Studi ini menggunakan perspektif baru tentang pelayanan publik dengan fokus pada inovasi berbasis teknologi dalam pelayanan publik. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi Inovasi Pelayanan Publik Kota Tangerang telah berhasil karena telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan banyak manfaat dalam hal ketepatan waktu, kemudahan penggunaan, dan kemudahan akses pelayanan. Namun, masih diperlukan disebarluaskan agar masyarakat dapat benar-benar menggunakan pelayanan berbasis teknologi Aplikasi Tangerang Live.

“Evaluasi Program Literasi Sekolah di Sekolah Dasar di Kota dan Kabupaten Tangerang” oleh Ana Magdalena, Asya Rosengsiah, Maroof Akbar, dan Robinson Setumorang (2022). Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana Program Literasi Sekolah (SMP) telah diimplementasikan di berbagai sekolah dasar di Kota dan Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan penulisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi telah terjadi tetapi tidak merata: beberapa sekolah telah menerapkan kegiatan membaca secara rutin, tetapi banyak yang masih menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas, waktu, dan partisipasi siswa atau guru.

“Efektivitas dan Evaluasi Pendidikan Inklusif di SMP 11, Kota Tangerang Selatan” oleh Fadhilah Al-Jannah, Siti Khoeriyah, dan Ika (2024). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pendidikan inklusif di SMP 11 Tangerang Selatan, dan untuk meneliti bagaimana siswa inklusif didukung, bagaimana guru menggunakan metode inklusif, dan untuk meneliti tantangan pembelajaran dan efektivitas dalam mencapai siswa inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara observasional dan bahan pembelajaran sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi siswa telah meningkat, tetapi masih terdapat masalah, seperti kurangnya pelatihan guru yang terspesialisasi, keterbatasan sumber belajar, dan kurangnya pemantauan kemajuan siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Diya Haldiyaniti, Rina Permatasari, dan Indra Sadrajat (2023) berjudul “*Penilaian Pembelajaran Berbasis Komputer di LPK Teknos Ciruas, Serang, Banten*” bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelatihan komputer pada lembaga pendidikan nonformal LPK Teknos. Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas proses pelatihan komputer yang diberikan kepada peserta didik serta dampaknya terhadap peningkatan keterampilan teknologi informasi yang dimiliki peserta.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap pengelola lembaga, instruktur, dan peserta pelatihan. Model CIPP digunakan untuk menilai beberapa aspek penting, yaitu konteks kebutuhan

pelatihan, kesiapan sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan pelatihan, serta hasil yang diperoleh peserta setelah mengikuti program pelatihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan komputer yang dilaksanakan di LPK Teknos secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan komputer peserta. Peserta pelatihan dinilai mengalami peningkatan kemampuan dalam pengoperasian perangkat lunak dasar serta penggunaan teknologi informasi untuk kebutuhan kerja. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program, antara lain keragaman latar belakang peserta, keterbatasan fasilitas dan peralatan komputer, serta durasi pelatihan yang relatif singkat, sehingga materi yang disampaikan belum dapat mencakup keterampilan komputer tingkat lanjut secara optimal.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan dalam studi ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan evaluasi program untuk menilai efektivitas suatu layanan berbasis teknologi. Penelitian Haldiyanthi dkk. menggunakan model evaluasi CIPP untuk menilai program pelatihan komputer, sedangkan penelitian ini juga menggunakan pendekatan evaluatif untuk melihat efektivitas implementasi layanan publik berbasis teknologi.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian Haldiyanthi dkk. berfokus pada evaluasi program pendidikan nonformal dalam bentuk pelatihan komputer yang bertujuan meningkatkan keterampilan teknologi informasi masyarakat. Sementara itu,

penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan publik dalam implementasi program Tangerang Cerdas, yang merupakan layanan berbasis teknologi untuk mendukung akses pendidikan formal bagi masyarakat di Kota Tangerang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda karena menelaah implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Mengenai penelitian, semua studi sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan wawancara dan tulisan sebagai metode pengumpulan data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan informasi mendalam tentang efektivitas, keterbatasan, dan dampak evaluasi program terhadap masyarakat. Dibandingkan dengan studi sebelumnya, studi "Studi Evaluasi Program Tangerang Cerdas di Kota Tangerang: Perspektif Kebijakan Publik" memiliki banyak kesamaan dalam pendekatan dan isi umum, tetapi juga memperkenalkan dimensi baru. Masalah, atau topik penelitian, muncul dari kurangnya studi sebelumnya yang secara khusus meneliti program pendidikan hukum di daerah seperti Tangerang Serdas menggunakan metodologi evaluasi kebijakan publik. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan daerah dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk mendorong akses pendidikan yang adil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.6 Landasan Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini merupakan landasan konseptual yang menghubungkan konsep-konsep utama yang digunakan untuk menganalisis Evaluasi Program Tangerang Cerdas di Kota Tangerang dari perspektif kebijakan publik. Dalam kerangka teori ini, beberapa teori kunci yang relevan diidentifikasi dan akan dijelaskan secara rinci, meliputi teori kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi dan teknologi dalam pelayanan publik.

1.6.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang dan dievaluasi oleh pemerintah untuk menangani masalah atau tantangan yang dihadapi masyarakat. Thomas Dye (2001) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dalam menganalisis kebijakan publik, teori kebijakan publik menyediakan kerangka kerja konseptual yang mencakup berbagai konsep dan tahapan. Dalam konteks evaluasi Program Tangerang Cerdas, teori ini menjadi sangat relevan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap peningkatan akses pendidikan.

1.6.1.1 Kerangka Teori Kebijakan Publik

1. Proses pembuatan kebijakan. Menurut Anderson (1979), proses kebijakan publik terdiri dari tiga tahap utama: Pertama, perumusan kebijakan. Tahap ini mencakup identifikasi masalah, analisis solusi potensial, dan penetapan kebijakan berdasarkan pilihan yang dianggap paling optimal. Kedua, evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui program, regulasi, atau kegiatan pemerintah. Ketiga, evaluasi kebijakan. Tahap ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kebijakan dengan mempertimbangkan indikator tertentu, seperti capaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan dampaknya terhadap masyarakat.

2. Evaluasi kebijakan merupakan elemen kunci menentukan sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan yang direncanakan. Evaluasi melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek seperti: Efektivitas, apakah kebijakan berhasil menyelesaikan masalah yang digunakan? Dalam konteks Program Tangerang Cerdas, efektivitas dapat diukur dari peningkatan jumlah siswa yang mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Efisiensi, apakah sumber daya yang digunakan dalam kebijakan tersebut dimanfaatkan secara optimal?. Relevansi, apakah kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang menjadi target program?. Dampak, bagaimana kebijakan memengaruhi masyarakat secara luas, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun pendidikan.

1.6.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan dari perspektif siklus kebijakan publik. Evaluasi ini mengikuti proses evaluasi kebijakan, sehingga wajar jika kebijakan

publik yang telah dikembangkan diimplementasikan dan kemudian dievaluasi. Menurut Parsons (2005), proses perumusan dan evaluasi kebijakan merupakan titik awal analisis kebijakan publik. Studi evaluasi kebijakan penting karena hasilnya akan menentukan kelanjutan suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu, studi evaluasi kebijakan tidak dapat dianggap sebagai proses formal. Sebaliknya, studi tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut William Dunn, sebagaimana dikutip dalam Suratman (2017: 160-161), secara umum, evaluasi dapat disamakan dengan penilaian, evaluasi, dan evaluasi. Evaluasi secara khusus melibatkan pengumpulan data tentang biaya atau manfaat dari suatu keputusan kebijakan. Proses pemeriksaan apakah suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang dimaksudkan adalah evaluasi kebijakan. Namun, seperti yang dikemukakan Parsons, sebagaimana dikutip dalam Angara (2014: 274), penelitian evaluasi kebijakan adalah proses penentuan, pemantauan, evaluasi, dan implementasi kebijakan publik. Studi evaluasi kebijakan melibatkan penilaian apakah tujuan yang dinyatakan dalam suatu kebijakan publik telah tercapai.

Berdasarkan definisi yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses mengevaluasi implementasi suatu kebijakan dan menentukan apakah kebijakan tersebut efektif. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menentukan apakah kebijakan tersebut layak dilanjutkan atau sebaiknya tidak lagi diimplementasikan. Evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang dilakukan

untuk mengumpulkan informasi terkait semua hasil evaluasi kebijakan, kemudian mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam hal implementasi dan hasil kebijakan, untuk memberikan panduan bagi implementasi kebijakan di masa mendatang.

1.6.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi layanan publik dan kebijakan publik lainnya bukanlah tugas yang mudah, karena evaluasi dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang dan bergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya. Oleh karena itu, metrik sangat penting untuk mengukur keberhasilan suatu layanan publik atau kebijakan. Dunn (2008: 429) menyediakan metrik yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan layanan publik atau kebijakan, baik yang diimplementasikan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, yang mencakup enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kesesuaian, keadilan, daya tanggap, dan kelayakan. Dimensi-dimensi ini dijelaskan di bawah ini.

1.6.3.1 Efektivitas

Dampak adalah salah satu metrik kunci dalam evaluasi kebijakan publik karena menunjukkan sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang dinyatakan. Dunn (2008) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil yang diinginkan atau hasil kebijakan. Suatu program dianggap efektif jika hasil dan dampaknya mampu mengatasi masalah publik yang menjadi dasar pernyataannya.

Emerson (dalam Handayaniingrat, 2011) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dengan kata lain, suatu kegiatan atau program dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Sementara itu, Mahmoudi (2005) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi suatu program terhadap pencapaian tujuan kebijakan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas program tersebut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui hasil atau dampak yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, efektivitas program Smart Tangerang diukur tidak hanya dari segi pencapaian tujuan keseluruhannya, tetapi juga melalui beberapa sub-ukuran, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan Program

Mengukur kesesuaian antara tujuan Program Tangerang Cerdas sebagaimana tercantum dalam Perda Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2019 dan Perwal Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2019 dengan realisasi pelaksanaannya, meliputi ketepatan sasaran penerima bantuan, cakupan peserta didik, serta kontinuitas pemberian bantuan pendidikan.

2. Manfaat Program bagi Penerima

Menilai sejauh mana bantuan pendidikan yang diberikan mampu meringankan beban ekonomi keluarga, meningkatkan keberlanjutan sekolah peserta didik, serta memperluas akses terhadap fasilitas dan perlengkapan pendidikan yang layak.

3. Dampak Program (Impact)

Mengkaji dampak Program Tangerang Cerdas terhadap penurunan angka putus sekolah di Kota Tangerang, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah program berjalan.

4. Kualitas Hasil Program

Menilai kualitas hasil pelaksanaan program, antara lain melalui keberlanjutan pendidikan peserta didik penerima bantuan, peningkatan partisipasi sekolah, serta konsistensi monitoring dan pendampingan akademik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Duncan (dalam Steers, 2012), efektivitas program juga ditentukan oleh kemampuan integrasi dan adaptasi organisasi. Dalam konteks Program Tangerang Cerdas, integrasi tercermin dari koordinasi antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat, sedangkan adaptasi terlihat dari kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan pelaksanaan program dengan perubahan regulasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan menggunakan sub-indikator tersebut, evaluasi efektivitas Program Tangerang Cerdas diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan kebijakan pendidikan daerah, tidak hanya dari sisi pencapaian target administratif, tetapi juga dari manfaat nyata dan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

1.6.3.2 Efisiensi

Efisiensi dan efektivitas sangat berkaitan. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, efisiensi terjadi ketika sumber daya digunakan dengan cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Namun, William N. Dunn menyatakan bahwa efisiensi adalah jumlah upaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat output tertentu. Efisiensi, sebuah konsep dalam ekonomi, adalah hubungan antara kinerja dan upaya, yang terakhir sering diukur dalam satuan moneter. Dunn (2008: 430) menunjukkan bahwa biaya satuan barang dan jasa sering digunakan untuk menentukan efisiensi. Kebijakan dapat dianggap efektif jika menghasilkan manfaat terbesar dengan biaya terendah.

1.6.3.3 Kesesuaian

Kecukupan suatu kebijakan publik berarti bahwa tujuan-tujuan tersebut dianggap memadai dalam beberapa hal. Menurut Dunn (2008: 430), kecukupan adalah tingkat di mana tingkat kinerja cukup untuk memenuhi kebutuhan, biaya, atau peluang yang menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kecukupan berkaitan dengan kinerja dengan mengukur atau

memperkirakan sejauh mana pilihan yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan, biaya, atau peluang untuk memecahkan masalah.

Menurut Dunn (2008: 430), ukuran kecukupan mengacu pada pentingnya hubungan antara pilihan kebijakan yang tersedia dan hasil yang diinginkan. Semua ukuran ini berkaitan dengan empat jenis masalah:

1. Masalah tipe I terdiri dari biaya tetap dan efektivitas yang berubah akibat kebijakan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan efektivitas pada batas resorsis yang tersedia.
2. Masalah tipe II terdiri dari masalah yang sama dan biaya yang berubah akibat kebijakan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
3. Masalah tipe III terdiri dari masalah yang sama dan biaya yang berubah akibat kebijakan.
4. Masalah tipe IV terdiri dari biaya dan efektivitas yang berubah akibat kebijakan. Karena kemungkinan besar satu-satunya opsi kebijakan adalah tidak melakukan apa pun, masalah ini dapat dianggap sulit untuk diselesaikan.

Isu-isu yang dibahas di atas sebagian besar bersifat hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa isu-isu tersebut termasuk dalam kategori ini. Ini berarti bahwa sebelum menyetujui dan menerapkan instrumen hukum, perlu diperiksa apakah metode yang digunakan konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apakah metode tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1.6.3.4 Perataan

Mengenai keadilan yang diberikan dan dicapai oleh tujuan kebijakan publik, keadilan dapat bermanfaat dalam kebijakan publik. Konsep keadilan dekat dengan hukum dan hubungan sosial, menunjukkan distribusi manfaat dan upaya antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Menurut Dunn (2008:434), kebijakan yang berfokus pada keadilan adalah kebijakan di mana manfaat atau upaya didistribusikan secara adil dalam program tertentu. Suatu kebijakan dapat efektif, efisien, dan tepat ketika tujuan utama keadilan adalah keadilan dan kesetaraan.

Dunn (2008:435) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan di mana suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu pada saat yang bersamaan. Ini berarti bahwa biaya bagi setiap individu harus digunakan untuk membuat pilihan tertentu.
2. Mempertahankan kesejahteraan minimum. Di sinilah analisis mencoba meningkatkan kesejahteraan beberapa individu sambil mempertahankan posisi mereka yang paling menderita. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip Pareto, yang menyatakan bahwa suatu keadaan dalam masyarakat dianggap lebih baik daripada keadaan lain jika setidaknya satu individu menjadi lebih baik dan tidak ada yang menjadi lebih buruk.

3. Memaksimalkan kesejahteraan: Dalam hal ini, analisis mencoba memaksimalkan kesejahteraan tetapi mengasumsikan bahwa manfaat dapat digunakan sebagai pengganti kerugian. Pendekatan ini didasarkan pada model Kaldor-Hicks, yang menyatakan bahwa suatu keadaan dalam masyarakat lebih baik daripada keadaan lain jika kualitas kerja meningkat dan jika pihak yang diuntungkan dapat menggantikan pihak yang dirugikan. Untuk alasan praktis, model ini tidak memerlukan kompensasi bagi pihak yang dirugikan.
4. Maksimisasi kesejahteraan: Dalam hal ini, analisis berupaya memaksimalkan kesejahteraan kelompok-kelompok terpilih, seperti kaum miskin, orang sakit, atau kaum yang tertindas secara rasial. Menurut filsuf John Rawls, redistribusi terjadi ketika suatu situasi sosial dianggap lebih baik daripada situasi lain jika hal itu meningkatkan kesehatan individu yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.

Kebijakan harus diterapkan secara adil dan merata di semua sektor, dan semua lapisan masyarakat harus mendapatkan manfaat dari hasilnya. Layanan publik adalah layanan yang diberikan pemerintah kepada warga negara, secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi fungsi sosial. Layanan publik disediakan oleh otoritas pemerintah.

1.6.3.5 Responsivitas

Dalam konteks kebijakan publik, respons dapat didefinisikan sebagai respons terhadap tindakan, yaitu respons tujuan kebijakan publik terhadap

implementasi suatu kebijakan. Dunn (2008:437) menyatakan bahwa respons adalah sejauh mana suatu kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai sekelompok orang dalam masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari respons publik terhadap implementasi kebijakan tersebut. Dampak kebijakan tersebut dapat dinilai ketika diimplementasikan. Respons publik juga dapat diamati setelah kebijakan tersebut berlaku dalam praktik dan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Model umpan balik penting karena evaluasi yang memenuhi semua kriteria (efektivitas, efisiensi, kesesuaian, dan keadilan) tidak akan berhasil jika tidak memenuhi kebutuhan nyata kelompok yang akan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut (Dunn, 2008:437).

1.6.3.6 Ketepatan

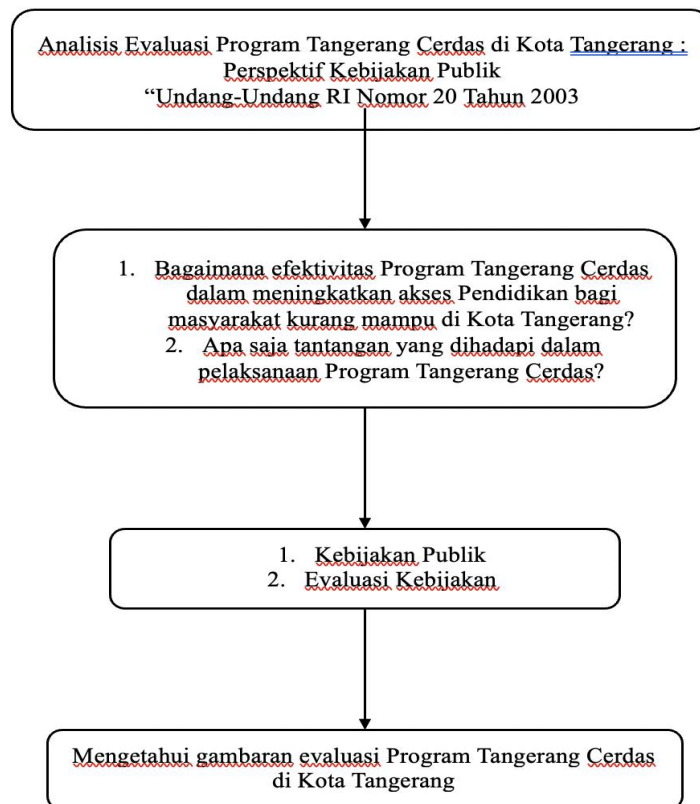
Kelayakan mengacu pada nilai atau manfaat dari tujuan program dan kekuatan asumsi yang mendasarinya. Kelayakan adalah proses yang digunakan untuk memilih serangkaian opsi untuk disetujui, dengan menilai apakah hasil dari opsi-opsi tersebut merupakan hasil yang diinginkan, menurut Dunn (2008:499). Kelayakan mengacu pada definisi tujuan dan metode atau alat yang digunakan untuk mencapainya. Ini mengacu pada pertimbangan apakah suatu kebijakan atau tindakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah cara yang digunakan untuk mencapainya tepat dan rasional. Dalam hal ini, proses kelayakan tidak hanya melibatkan penilaian apakah tujuan dapat dicapai tetapi juga menilai seberapa tepat cara yang digunakan untuk mencapainya. Misalnya, apakah efek samping yang tidak diinginkan lainnya, baik negatif maupun positif, diperkirakan

akan terjadi, atau mungkin opsi alternatif dianggap lebih baik daripada menerapkan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut dapat diadopsi secara lebih luas.

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan alur pemikiran peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan penelitian. Kerangka ini disusun untuk menunjukkan hubungan antara permasalahan penelitian, teori yang digunakan, serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Dengan adanya kerangka berpikir, penelitian menjadi lebih terarah karena peneliti memiliki pedoman dalam melakukan analisis terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi Program Tangerang Cerdas di Kota Tangerang sebagai salah satu bentuk kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan dukungan terhadap pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Dalam pelaksanaannya, program tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.8 Operasionalisasi Konsep

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan diteliti sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi ini menjelaskan metode tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, memungkinkan peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan teknik pengukuran konstruk yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program tangerang cerdas, serta cara evaluasi sarana dan prasarana program tersebut.

Teori	Indikator	Sub Indikator
-------	-----------	---------------

Evaluasi Kebijakan oleh Wiliiam Dunn (2003) Evaluasi adalah sebuah proses untuk mengetahui dampak dan efektifitas mengenai sejauh mana kegiatan telah dilakukan dan dicapai dengan kemudian dilakukan penilaian	Efektivitas	Mengukur apakah kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan. 1. Kesesuaian tujuan dengan evaluasi Program yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana awal yang disusun, kemudian dapat mencapai sasaran program yang ditentukan. 2. Manfaat nyata bagi penerima Meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik, meningkatkan kualitas pembelajaran dan menekan atau menurunkan angka kasus putus sekolah di wilayah tersebut. 3. Kualitas hasil program Memberikan dampak pada prestasi belajar peserta didik dan memberikan kepuasan pas masyarakat terhadap hasil program. 4. Capaian target Jumlah penerima bantuan sesuai dengan yang ditargetkan, serta pendistribusian bantuan dilakukan dengan tepat waktu.
	Efisiensi	Menilai hubungan antara input (biaya, tenaga, waktu) dengan output yang dihasilkan. 1. Biaya Kecukupan biaya anggaran untuk melaksanakan program, adanya transparansi penggunaan dana, kemudian realisasi anggaran yang sesuai dengan rencana. 2. Output Jumlah siswa penerima manfaat, jumlah sekolah atau daerah yang terjangkau program, dan juga pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar. 3. Mekanisme distribusi Mekanisme terhadap proses pencairan bantuan berjalan dengan lancar, waktu penyaluran yang tepat sesuai jadwal dan tidak adanya hambatan birokrasi. 4. Perbandingan biaya dan hasil Besar dana yang dikeluarkan seimbang dengan peningkatan kualitas pendidikan, efisiensi tenaga administrasi dalam pelaksanaan.
	Kecukupan	Mengukur sejauh mana kebijakan mampu mengatasi masalah yang menjadi dasar pembuatannya. 1. Ketersediaan anggaran Cukupnya anggaran untuk program

		dalam jangka yang panjang. Adanya ketersediaan dana darurat untuk mengatasi hambatan yang terjadi. 2. Sumber daya manusia Aparat pelaksana yang kompeten dan memadai. Terdapatnya tenaga pendukung pendidikan yang cukup. 3. Infrastruktur Terdapatnya sarana serta prasarana pendukung program yang tersedia. Adanya dukungan teknologi dalam distribusi bantuan. 4. Dukungan kelembagaan Kolaborasi diantara instansi yang berjalan, serta terdapat dukungan pemerintah daerah dan sekolah yang memadai.
	Perataan	Mengukur sejauh mana kebijakan memberikan manfaat secara adil kepada semua kelompok masyarakat. 1. Keadilan akses Seluruh siswa yang mempunyai kesempatan yang sama. Tidak adanya diskriminasi yang berdasarkan gender, status ekonomi maupun lokasi. 2. Distribusi wilayah Pemerataan fasilitas dan layanan juga perlu dilakukan antara sekolah negeri dan swasta agar tidak terjadi ketimpangan mutu pendidikan. Dengan distribusi wilayah yang merata, maka semua siswa, tanpa terkecuali, dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama. 3. Penyesuaian kelompok rentan Dukungan lebih besar, baik berupa bantuan materiil maupun non-materiil, harus diberikan agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan. Penyediaan prioritas ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan partisipasi pendidikan di kalangan kelompok rentan. 4. Kesetaraan manfaat Tidak boleh ada kelompok yang merasa tertinggal atau tidak memperoleh manfaat dari kebijakan yang diterapkan. Kesetaraan manfaat ini menjadi indikator bahwa program berjalan adil serta mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat

		dengan kebutuhan yang berbeda-beda.
	Responsivitas	Mengukur sejauh mana kebijakan mampu menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat. 1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat Kebijakan pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, baik dalam hal kurikulum, fasilitas, maupun dukungan bagi siswa. Program yang dilaksanakan harus sesuai dengan kondisi ekonomi penerima sehingga bantuan yang diberikan dapat benar-benar membantu. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat. 2. Penilaian masyarakat Tingkat keberhasilan suatu program dapat diukur melalui penilaian masyarakat sebagai penerima manfaat. Apabila masyarakat menilai program bermanfaat dan terjadi peningkatan kepuasan publik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan dengan baik. 3. Kesesuaian dengan aspirasi masyarakat Program pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan sangat penting untuk memastikan kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan. 4. Keberlanjutan program Respon masyarakat terhadap keberlanjutan program menjadi salah satu indikator penting keberhasilan kebijakan. Dukungan masyarakat dalam mempertahankan program menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dianggap relevan, bermanfaat, dan layak dilanjutkan
	Ketepatan	Mengukur apakah kebijakan tepat dalam menentukan sasaran, cara, dan hasil. 1. Ketepatan sasaran Program pendidikan harus mampu menjangkau penerima yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Tidak boleh ada penyalahgunaan bantuan sehingga manfaat benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. 2. Ketepatan target

		Kebijakan pendidikan harus mampu mencapai target jumlah penerima manfaat sesuai dengan rencana. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi tujuan utama juga harus tercapai. 3. Manfaat langsung Manfaat kebijakan pendidikan perlu dirasakan secara nyata oleh penerima. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan, kemudahan dalam mengakses layanan pendidikan, maupun dampak positif terhadap prestasi siswa. 4. Kesesuaian hasil dengan tujuan Hasil yang dicapai dari sebuah program pendidikan harus selaras dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada kesenjangan signifikan antara rencana dan realisasi.
--	--	---

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitik. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai efektivitas, tantangan, dan dampak Program Tangerang Cerdas. Pendekatan analitik digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen (efektivitas program dan tantangan pelaksanaan) dengan variabel dependen (kualitas pendidikan).

1.9.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan pendapat Moleong, (2011) dalam menentukan situs penelitian maka cara terbaik untuk menempuhnya adalah dengan mempelajari fokus beserta perumusan masalah penelitian, membandingkan kesesuaian kenyataan di lapangan,

dan mempertimbangkan substansi teori penelitian. Situs penelitian yaitu tempat yang menjadi lokasi penelitian dengan tujuan mendapatkan berbagai data-data dan informasi-informasi terkait permasalahan penelitian. Situs penelitian ini bertempat di Dinas pendidikan Kota Tangerang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Sugiono (2019) menyarankan bahwa orang yang menjadi target harus memiliki pemahaman dan keterkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang menarik untuk penelitian dengan hasil yang representatif. Dalam memilih informan, metode snowball sampling akan digunakan untuk menentukan informan selanjutnya, informan kunci akan didasarkan pada arahan direktur program Smart Tangerang di kota Tangerang. Peneliti juga akan menggunakan metode random sampling, memilih informan berdasarkan kesamaan berdasarkan siapa yang ditemui peneliti dan dianggap sebagai sumber informasi, yaitu masyarakat yang mendapat manfaat dari program Smart Tangerang.

1.9.4 Sumber dan Jenis Data

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu wawancara mendalam, dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada petugas pelaksana program untuk menggali lebih jauh kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program serta memperoleh rekomendasi perbaikan.

Metode ini memberikan wawasan yang kaya dan mendalam, sesuai dengan prinsip-prinsip. evaluasi kualitatif yang menitikberatkan pada eksplorasi pengalaman dan perspektif responden (McDavid & Hawthorn, 2006).

Metode kedua adalah observasi, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program, seperti proses distribusi bantuan dan dampaknya terhadap siswa penerima manfaat. Observasi ini bertujuan untuk memverifikasi data kuesioner dan wawancara, serta memberikan gambaran empiris tentang evaluasi program di lapangan. Teknik triangulasi ini penting untuk meningkatkan validitas data, sebagaimana diungkapkan oleh Robson (2002), yang menyatakan bahwa kombinasi berbagai metode pengumpulan data dapat memperkuat keakuratan temuan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang relevan dengan pelaksanaan Program Tangerang Cerdas. Sumber utama mencakup laporan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kebijakan, target, serta capaian program. Selain itu, statistik pendidikan Kota Tangerang digunakan untuk memahami konteks pendidikan secara umum, termasuk tingkat partisipasi siswa, ketersediaan fasilitas, dan indikator pendidikan lainnya yang mendukung analisis program. Data ini diperkuat dengan data penerima manfaat Program Tangerang Cerdas, yang memuat informasi terperinci tentang jumlah penerima bantuan, kategori penerima, dan durasi pelaksanaan program.

Penggunaan data sekunder ini tidak hanya membantu memperkaya informasi, tetapi juga menyediakan dasar untuk validasi temuan dari data primer. Sebagaimana diungkapkan oleh McDavid dan Hawthorn (2006), dokumen resmi dan data statistik dapat berfungsi sebagai sumber bukti yang kuat untuk mengevaluasi evaluasi dan keberhasilan program. Dengan kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam terkait efektivitas Program Tangerang Cerdas.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pemahaman memperoleh informasi-informasi tertentu untuk menjawab pertanyaan atas suatu permasalahan dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan baik bertatap muka, maupun tidak bertatap muka sehingga mendapatkan berbagai macam perspektif atau pandangan tentang penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap petugas pelaksanaan program untuk memahami tantangan, keberhasilan, dan evaluasi pelaksanaan program. Pihak yang akan diwawancarai meliputi Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan masyarakat penerima manfaat, dengan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan mengarah pada aktor-aktor kebijakan yang terlibat pada Program Beasiswa Tangerang Cerdas, yang mana telah diatur pada Peraturan Walikota Tangerang Nomor 25 Tahun 2023 yakni :

1. **Pembuat kebijakan** : Wali Kota Tangerang melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Beasiswa Tangerang Cerdas.
2. **Pelaksana kebijakan** : Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Sekolah-sekolah, yang diwakili oleh kepala sekolah, sebagai pihak yang mengajukan usulan penerima beasiswa melalui aplikasi Tangerang Cerdas.
3. **Sasaran Kebijakan** : Peserta didik (anak-anak) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (DP3KE). Orang tua/wali murid sebagai pihak yang merasakan manfaat dari program. Komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat pendidikan yang ikut mengawasi evaluasi program.

Untuk memperdalam data, penelitian ini menetapkan tiga narasumber utama yang mewakili masing-masing aktor kebijakan yakni sebagai berikut:

1. Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Tangerang – pejabat/staf yang menangani Program Tangerang Cerdas.
2. Kepala Sekolah – yang terlibat dalam pengajuan usulan penerima beasiswa di sekolah.
3. Orang Tua/Wali Murid penerima manfaat – sebagai pihak yang merasakan dampak langsung program.

2. Observasi

Dalam metode penelitian kualitatif, observasi merupakan metode pengumpulan data yang banyak digunakan. Salah satu bagian dari pengumpulan data adalah observasi, yang berarti memperoleh data langsung dari lapangan (Semyawan, 2010). Para peneliti melakukan observasi lapangan untuk menilai efektivitas program Smart Tangerang dan persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Hasil penelitian ini tidak mengubah realitas lapangan, dan keakuratan data dikonfirmasi setelah observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder berbentuk referensi berupa buku atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dokumen-dokumen pendukung penelitian melalui hasil dokumentasi di lapangan.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis diskursif Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada data sekunder dan data wawancara kualitatif, tanpa menggunakan instrumen analitis atau kuantitatif sebagai kriteria.

1. Reduksi data

Data primer dikumpulkan untuk memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari sumber sekunder dan primer. Data

sekunder dianalisis yang mencakup data primer dari Pemerintah Kota Tangerang, seperti laporan dari Dinas Pendidikan, data pendidikan dari Badan Pendidikan Pusat (BPS), Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang (RPJMD), peraturan daerah, peraturan walikota, dan data observasi serta laporan tentang implementasi program Smart Tangerang.

Selain itu, data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat dalam implementasi program, seperti kepala Dinas Pendidikan dan kepala sekolah, untuk membantu memahami konteks implementasi kebijakan. Pada tahap ini, data yang tidak relevan dengan fokus penelitian, seperti asumsi umum yang tidak berdasarkan data atau hasil aktual, dihilangkan. Data yang dipertahankan adalah data yang secara langsung terkait dengan indikator kinerja program, pencapaian pendidikan, angka putus sekolah, hasil penerima manfaat, dan hambatan implementasi program. Pengurangan data merupakan proses berkelanjutan sepanjang penelitian untuk memastikan bahwa analisis tetap fokus dan mendalam. Menurut Miles dan Huberman (1994), reduksi data membantu peneliti mengidentifikasi pola, struktur, dan hubungan penting dalam data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat diandalkan dan berdasarkan bukti empiris.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi deskriptif yang bersumber dari

data sekunder resmi. Misalnya, tabel perkembangan jumlah penerima Program Tangerang Cerdas, tren angka putus sekolah di Kota Tangerang berdasarkan data BPS dan Dinas Pendidikan, serta perbandingan alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.

Penyajian data ini tidak menggunakan skala persepsi seperti “cukup” atau “sangat cukup”, melainkan menampilkan capaian riil dan indikator objektif, seperti jumlah siswa penerima manfaat, persentase penurunan angka putus sekolah, serta cakupan sekolah yang terlibat dalam program. Narasi deskriptif digunakan untuk menjelaskan konteks kebijakan, mekanisme pelaksanaan program, serta kendala administratif dan teknis yang ditemukan dalam implementasi Program Tangerang Cerdas.

Menurut McDavid dan Hawthorn (2006), penyajian data yang berbasis bukti empiris dan dokumen resmi sangat penting dalam evaluasi kebijakan publik karena dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja program dan menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan kebijakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan. Kesimpulan mencakup penilaian terhadap efektivitas Program Tangerang Cerdas dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, kesesuaiannya dengan tujuan kebijakan yang tertuang dalam regulasi daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan, dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan data statistik resmi, dokumen kebijakan, dan hasil wawancara dengan informan kunci. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi dan menghindari bias subjektif dalam penilaian program. Patton (2008) menegaskan bahwa triangulasi merupakan teknik penting dalam penelitian evaluasi untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan berbasis data mengenai efektivitas dan tantangan pelaksanaan Program Tangerang Cerdas, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tangerang.